

PELAYARAN NIAGA, BAJAK LAUT, PERKAMPUNGAN PEDAGANG DI GORONTALO

COMMERCIAL SHIPPING, PIRATE, AND MERCHANT VILLAGE IN GORONTALO

Hasanuddin

Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Utara
Jalan Katamso, Bumi Beringin Lingkungan Manado
Telepon (0431) 864926 Faksimile (0431) 864926

Pos-el: anwar_hasanuddin@yahoo.com

Diterima: 18 Juni 2018; Direvisi: 18 September 2018; Disetujui: 30 November 2018

ABSTRACT

Gorontalo has a strategic role in commercial shipping network because of its geographical in region of Tomini Bay that connects Ternate and Makassar. The availability of gold, slaves, rattan, and copra are commodities that attracted the traders. Gorontalo, in the context of commercial shipping, is a factor forming the social and political structure of the Kingdom of Gorontalo, thus affecting the development of the people live. As a maritime region in the northern part of Sulawesi with historical dynamics that has relations with surrounding kingdoms and communities, and colonial power; the history of Gorontalo has not been academically exposed and has not been adequately publicized as an important point of colonial power of the Dutch East Indies. Referring to this problem, this article aims to describe the historical conditions of Gorontalo, including: the position of Gorontalo in the national shipping lane, the dynamics of inter-island trades, the dynamics and activities of pirates in Gorontalo, and the presence of villages in form of traders and migrants settlements. Methodologically, this article is a historical study in the Dutch colonial period which was based on library research and archives, especially from the colonial period related to the topic of this article. Finally, this article concludes that Gorontalo maritime network is one of the important factors in the integration form of eastern Sulawesi, either in term of community or kingdom and power connections. Traders and migrants form a community that has multiple characteristics in Gorontalo which can be seen today. This condition gave birth to a new situation through intensive relations between newcomers and local residents, thus showing a dynamic cultural process with a variety of different backgrounds, then found the Bugis, Donggala, Tamalate, Minahasa, Chinese and Arabic villages which all played roles in the development of commercial shipping network in Gorontalo.

Keywords: *shipping, commerce, pirate, merchant village, Gorontalo.*

ABSTRAK

Gorontalo memiliki peran strategis dalam jaringan pelayaran niaga karena letak geografisnya di kawasan Teluk Tomini yang menghubungkan Ternate dan Makassar. Selain itu, tersedianya emas, budak, rotan, dan kopra merupakan komoditas yang menarik kedatangan para pedagang. Gorontalo dalam konteks pelayaran niaga menjadi faktor pembentuk struktur sosial dan politik Kerajaan Gorontalo, sehingga mempengaruhi perkembangan kehidupan masyarakatnya. Sebagai sebuah wilayah maritim di bagian utara Sulawesi dengan dinamika sejarah yang memiliki hubungan dengan kerajaan-kerajaan dan komunitas-komunitas di sekitarnya, serta kekuasaan kolonial, Sejarah Gorontalo belum terekspos secara akademik dan belum terpublikasi secara memadai sebagai titik penting kekuasaan kolonial dalam format Hindia-Belanda. Mengacu pada masalah tersebut, artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi historis Gorontalo, meliputi: posisi Gorontalo dalam jalur pelayaran nusantara, dinamika perdagangan antarpulau, dinamika dan aktifitas bajak laut di perairan Gorontalo, dan kehadiran pemukiman dalam wujud perkampungan pedagang dan pendatang. Secara metodologis, artikel ini merupakan studi sejarah pada masa kolonial Belanda yang bertumpu pada penelitian pustaka dan arsip, terutama dari masa kolonial yang relevan dengan topik artikel ini. Akhirnya, artikel ini menghasilkan kesimpulan bahwa jaringan maritim Gorontalo menjadi salah satu faktor penting terbentuknya integrasi di kawasan perairan Sulawesi bagian timur, baik dalam arti komunitas maupun koneksi antarkerajaan dan kekuasaan. Para pedagang dan pendatang menjadi faktor pembentuk komunitas yang berkarakter majemuk

di Gorontalo yang dapat disaksikan hingga kini. Kondisi tersebut melahirkan situasi baru melalui hubungan intensif antara pendatang baru dengan penduduk setempat, sehingga memperlihatkan proses kultural yang dinamis dengan berbagai latar belakang yang berbeda, lalu ditemukan kampung Bugis, Donggala, Tamalate, Minahasa, Cina, dan Arab, yang kesemuanya itu berperan dalam pengembangan jaringan pelayaran niaga di Gorontalo.

Kata Kunci: pelayaran niaga, bajak laut, perkampungan pedagang, Gorontalo.

PENDAHULUAN

Dewasa ini kajian tentang sejarah Indonesia lebih banyak didominasi oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kerajaan-kerajaan di Nusantara bagi Lapien (1987) mengistilahkan peristiwa di darat. Walaupun gambaran tentang wilayah Indonesia menunjukkan bahwa lebih dari separuhnya adalah wilayah laut. Hal ini memberi petunjuk bahwa meskipun sekian abad kerajaan-kerajaan terpencar di kepulauan-kepulauan Nusantara tapi secara ekonomi, sosio-kultural dan politik sebenarnya mereka telah “bergabung” atau “digabungkan” dalam satuan-satuan yang lebih besar. Salah satu faktor penyatuan tersebut adalah terjadinya interaksi yang dinamis melalui jaringan pelayaran dan perdagangan.

Mahan (1890) mengungkapkan ide-idenya tentang pentingnya laut mempengaruhi kekuatan angkatan laut di seluruh dunia, karena menurutnya lautan memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan dan dioptimalkan. Mahan juga menjelaskan agar lebih menghargai laut, karena lautlah yang sesungguhnya memegang peran penting dalam proses penyatuan bangsa. Menurut Mahan ada 6 (enam) unsur yang menentukan dapat tidaknya suatu daerah atau negara berkembang menjadi kekuatan laut: (1) kedudukan geografi, (2) bentuk tanah dan pantainya, (3) luas wilayahnya, (4) jumlah penduduk, (5) karakter penduduk, dan (6) sifat pemerintahannya termasuk lembaga-lembaga pemerintahan. Karya Mahan kemudian terkenal dalam memahami hubungan pelayaran niaga.

Gorontalo mempunyai letak geografis yang cukup strategis berada di antara jalur pelayaran ramai, yaitu Laut Cina Selatan, Laut Sulawesi, Teluk Tomini, berdekatan dengan Ternate – sebagai pusat perdagangan rempah-

rempah, dan Makassar telah menguntungkan daerah ini sebagai daerah penghasil komoditas ekspor sekaligus menjadikan Gorontalo sebagai daerah transit jalur pelayaran dan perdagangan di kawasan Teluk Tomini. Jalur inilah merupakan jalan strategis atau kemudahan terpenting dalam konteks transportasi dan hubungan komunikasi lintas pulau. Tidak dapat dipungkiri bahwa faktor pelayaran niaga juga ikut berperan dalam menentukan dinamika sosial politik di Gorontalo.

Peta Letak Gorontalo



Sumber: <http://petacitra.blogspot.com/2012/08/download-peta-indonesia-terbaru-gratis.html>

Kegiatan pelayaran niaga yang dilakukan para pedagang pribumi serta asing ikut mendorong kemajuan Gorontalo. Beberapa komoditas penting yang dihasilkan Gorontalo turut mendukung para pedagang melakukan aktifitasnya di daerah ini. Tidak mengherankan komoditas emas dan budak, di samping komoditas hutan dan pertanian menjadi komoditas penting bagi para pedagang yang kemudian dipasarkan di Makassar, Singapura, dan negeri-negeri Eropa lainnya (Hoevel, 1891:19; Haga, 1931:50). Faktor lainnya sebagai tempat pertemuan (*rendezvous*) perdagangan maritim dan sungai menyebabkan Gorontalo berkembang sebagai bandar pelabuhan dan pasar komoditas perdagangan di kawasan Teluk Tomini.

Kegiatan pelayaran dan perdagangan pada prinsipnya melakukan usaha-usaha untuk mencari keuntungan ekonomis (*vent for surplus*) dan pertukaran budaya (*cross cultural trade*). Pelayaran yang dilakukan oleh bangsa Eropa telah menciptakan munculnya daerah-daerah baru yang dalam perkembangannya menciptakan kolonisasi dan berkembang menjadi bentuk orientasi politik (kekuasaan). Walaupun demikian, proses ini membawa transformasi budaya pada masyarakatnya sehingga terjadi adopsi dan adaptasi budaya yang semakin memperkaya bentuk kebudayaan.

Sehubungan dengan ini, masalah hubungan komunikasi sangat penting karena jalur-jalur komunikasi, baik melalui pelayaran maupun perdagangan telah menarik pedagang dari berbagai suku bangsa menetap dan menciptakan perkampungan suku bangsa. Faktor ini menciptakan interaksi antara penduduk setempat dan pendatang yang saling mempengaruhi satu sama lain. Sehubungan dengan ini maka jalur pelayaran dan jaringan perdagangan memberi peran penting dalam perkembangan masyarakat Gorontalo. Kondisi ini jelas membawa situasi baru dimana hubungan intensif antara para pedagang dan penduduk lama (pribumi) telah menciptakan komunitas sosial yang menjembatani sebuah proses kultural yang dinamis. Hal ini dapat terjadi karena masing-masing kelompok membawa ideologi, sistem kepercayaan, sistem politik dan berbagai unsur kebudayaan lainnya seperti adat istiadat, kesenian, kesusastaan, etos ekonomi, teknologi, dan sebagainya.

Selain itu, para bajak laut selain aktif melakukan perompakan di kawasan perairan Gorontalo, seperti Tobelo, Mangindanao, Mandar, Bugis, dan Makassar juga melakukan hubungan perdagangan dengan para bangsawan Gorontalo, sehingga turut mewarnai dinamika pelayaran dan perdagangan di kawasan itu. Bajak laut disebut sebagai orang yang melakukan tindakan kekerasan di laut, tanpa mendapat wewenang dari pemerintah untuk melakukan tindakan itu (Lapian, 2011:163).

Penulisan ini mencoba menjawab pertanyaan bagaimana kegiatan pelayaran niaga, bajak laut, dan perkampungan pedagang di Gorontalo. Meskipun tidak semua peristiwa tercantum dalam tulisan ini, namun diharapkan dapat menelusuri kegiatan maritim di Gorontalo, dan dapat menjadi acuan bagi kebijakan pembangunan masa kini dan akan datang.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode sejarah yaitu melalui beberapa tahap, pertama adalah mengumpulkan data-data sejarah (*heuristik*) dilakukan dengan proses menemukan, sumber-sumber sejarah. Oleh karena periode penelitian ini mencakup masa kolonial Belanda, maka sumber primer berupa arsip-arsip dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) seperti arsip, Koloniaal Verslag (KV), perjanjian atau kontrak dengan kolonial Belanda, serta surat kabar. Adapun sumber sekunder berupa buku-buku hasil kajian tentang pelayaran dan perdagangan Banggai didapatkan di perpustakaan.

Sumber-sumber primer yang telah dikumpulkan harus dikoreksi ulang, sebab titik tolak semua karya sejarah adalah mengenal penggunaan sumber primer maupun sekunder (Gottshalk, 1986: 35-40). Selain itu, landasan utama metode sejarah adalah bagaimana menangani bukti-bukti sejarah yang sesuai dengan pokok permasalahan yang akan ditulis. Sumber itu dapat berupa arsip dan surat-surat pribadi. Bukti-bukti ini dipelajari kemudian dipertimbangkan, mana yang sesuai dengan pokok masalah (Frederick & Soeroto, 1984: 13-14). Langkah ini dilaksanakan mengingat bahwa setiap keterangan tidak luput dari arti subyektif. Selanjutnya dilakukan kritik sumber baik otentitas atau keabsahan sumber sebagai kritik ekstern maupun kredibilitas sumber tersebut sebagai kritik intern (Kuntowijoyo, 1995: 100). Kemudian dilakukan interpretasi dengan merangkai, menghubungkan, dan menerangkan data-data yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji dapat menjadi sebuah historiografi (Kartodirdjo, 2014: 1-2).

PEMBAHASAN

Pelayaran Niaga

Para pedagang atau saudagar dari berbagai bangsa dan agama di Gorontalo disambut dengan terbuka oleh *olongia* (raja). Kegiatan pelayaran niaga dikuasai oleh *olongia* melalui *syahbandalie* (syahbandar) sebagai penghubung kepentingan *olongia* dengan para pedagang, seperti mengatur pajak masuk dan keluar pelabuhan, serta mengawasi dan melindungi perdagangan. Bagi para pedagang mendapatkan hak istimewa dari *olongia* dengan menerapkan perdagangan bebas (Lapian, 1997:144). Dasar perdagangan bebas dan peraturan hak istimewa para pedagang dimaksudkan apabila *olongia* terlampaui membatasi kebebasan para pedagang, maka mereka akan berniaga di kerajaan lain. Berlangsungnya sistem perdagangan terbuka dan bebas telah memungkinkan terjadinya peningkatan kebudayaan bagi penduduk karena menerima unsur-unsur baru dari luar.

Pada akhir abad ke-16, kegiatan pelayaran niaga di kawasan Gorontalo dilakukan oleh para pedagang Bugis dan Makassar dengan menggunakan perahu-perahu tradisional (*padewakang*). Perahu ini mempunyai bentuk yang ramping dan memiliki kemampuan bergerak cepat meskipun pengangkutannya terbatas. Kegiatan perahu Bugis dan Makassar menjadi urat nadi bagi perekonomian di kawasan utara Sulawesi sampai ke daerah pedalaman melalui pelayaran pantai dan sungai. Beberapa di antaranya disewa oleh para pedagang Cina dan langsung membawa komoditas terutama emas ke Cina (Juwono dan Hutagalung, 2005:20). Komoditas emas merupakan logam mulia yang mempunyai nilai harga tinggi dan laku dipasaran Internasional.

Kemajuan perdagangan Gorontalo juga menarik *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC) untuk menguasainya. Pada 27 September 1677, Gubernur Maluku, Robertus Padtbrugge melakukan kunjungan pertama di Gorontalo, dan melakukan pertemuan dengan *olongia* dan pembesar Kerajaan Gorontalo. Padtbrugge didampingi pembesar Ternate menekan *Olongia*

Gorontalo melalui kesepakatan Perjanjian Bungaya (Hasanuddin dan Amin, 57-59), bahwa Sultan Gowa mengakui hak-hak Ternate atas semua daerah Sulawesi yang letaknya antara Pulau Selayar dan Manado, serta semua tanah yang terbentang sampai Mandar (Pasal 17). raja Gorontalo tidak lagi mengakui Sultan Ternate sebagai penguasanya, namun tunduk kepada Gubernur Maluku di Ternate. Kemudian disepakati perjanjian yang memuat 8 pasal antara lain dalam Pasal 1 disebutkan Sungai Gorontalo harus dibuka bagi pelayaran kapal VOC (Juwono dan Hutagalung, 2005:74-75). Kesepakatan perjanjian itu merupakan awal kekuasaan VOC untuk mengatur kepentingan politik dan ekonominya di Gorontalo.

Pada tahun 1683, VOC menekan *Olongia* Gorontalo melalui perjanjian tambahan antara lain penyetoran emas sebanyak 2 kati dalam bentuk batangan setiap tahunnya kepada pejabat VOC di Manado. Penyerahan emas pertama kali dilakukan Mayuda sebagai utusan Gorontalo ke Manado. Setelah pejabat VOC mengetahui produksi emas Gorontalo mempunyai kualitas tinggi, maka Mayuda diperintahkan ke Ternate menghadap Gubernur Maluku, Jacobs Langs. Ketika Langs mengamati jenis emas tersebut, kemudian memerintahkan Mayuda menghadap Gubernur Jenderal, Joan Maaetsuyker ke Batavia. Maaetsuyker menyetujui penambahan pasal perjanjian tentang penyerahan emas pertahunnya (Juwono dan Hutagalung, 2005:103-104).

Pada 8 Desember 1728, penduduk Gorontalo migrasi ke daerah pegunungan yang berbatasan antara Gorontalo dan Kaidipang untuk melakukan penambangan emas. Setelah ditemukannya emas dengan kualitas lebih tinggi, maka para penambang menjualnya kepada pedagang Cina seharga 13 ringgit untuk 2 keping *real* emas. Harga emas semakin mahal ketika pedagang Cina menjualnya ke Manado seharga 12,5 ringgit untuk 1,5 keping emas. Berita tentang penemuan emas juga menarik pedagang Mandar dan Weda mengunjungi Kaidipang (Juwono dan Hutagalung, 2005:124-126).

Berita penemuan emas di perbatasan Gorontalo dan Kaidipang, serta potensi tambang emas di Gorontalo ternyata menarik perhatian Gubernur Maluku, Jacob Christiaen Pielat untuk memonopolinya, sehingga menghadap Gubernur Jenderal, Mattheus de Haan di Batavia. Setelah mendapat persetujuan de Haan untuk menguasai pasokan emas dari Gorontalo. Pada 31 Januari 1729, Pielat mengeluarkan keputusan yang melarang semua pedagang Cina berlayar ke Gorontalo, utamanya daerah-daerah penambangan emas. Selain itu, penduduk pribumi lainnya dilarang mendekati daerah tambang emas. Akibatnya terjadi sejumlah penyelundupan emas (Juwono dan Hutagalung, 2005:126-127). Untuk mengawasi penyelundupan emas, VOC mendirikan pos-pos di daerah tambang emas (Henley, 2005:41).

Pada tahun 1729, VOC di Batavia memerintahkan semua produksi emas Gorontalo harus dijual kepada kantor dagang VOC dengan harga *f. 10 per real*. Gubernur Maluku memperingatkan bahwa orang Gorontalo cukup cerdas dalam memahami emas murni yang bernilai lebih tinggi. Rendahnya harga yang ditetapkan VOC mendorong ramainya penyelundupan emas. Sebagian besar emas diselundupkan para pedagang Bugis dengan menawarkan harga lebih murah. VOC kemudian lebih menekan kegiatan penyelundupan dengan mengeluarkan kebijakan melalui perjanjian pada 22 Juli 1765 yaitu menetapkan kewajiban Gorontalo menyetor emas setiap tahunnya (Riedel, 1869:116). Pada tahun 1774, emas yang dipasok kepada VOC sekitar seperdelapan dari jumlah produksi emas di Gorontalo. Pada tahun 1846, produksi emas sebagian besar diselundupkan ke Singapura, dan diperkirakan empat kali lebih besar dari jumlah yang dikirim ke Belanda (Henley, 2005:93-96). Gubernur Maluku mengambil tindakan dengan menekan *olongia* dan bangsawan Gorontalo agar tidak melakukan kegiatan penambangan emas. Namun, beberapa bangsawan Gorontalo tetap terlibat dalam penjualan emas kepada para pedagang Bugis dan bajak laut yang berkeliaran di pantai Gorontalo. Di pihak lain, para pedagang

Bugis menawarkan kain, tembikar, barang-barang mewah, dan bahan makanan utamanya garam dengan harga yang murah (Juwono dan Hutagalung, 2005:127).

Selain emas, terdapat budak sebagai komoditas perdagangan. Sebagian besar budak berasal dari daerah pedalaman. Tindak kejahatan yang tidak membayar denda atau hutang yang tidak dibayar membuat pelakunya dijadikan budak seumur hidup (Riedel, 1869:67). Perbudakan semakin meningkat setelah VOC mengeluarkan peraturan bagi penduduk diwajibkan menyerahkan emas setiap tahunnya. Apabila tidak mampu membayar setoran emasnya, maka mereka dijual oleh pemimpinnya sebagai budak. Ratusan penduduk bersama istri dan anak-anaknya dijual kepada orang asing dan penduduk kaya dengan harga tinggi untuk menebus setoran emasnya. Kebanyakan di antara mereka dibawa ke Ternate dan Ambon. Masa penyetoran emas oleh penduduk disebut *tongade botia poololo* (masa tenang), karena kebanyakan penduduk (*tao lo lipu*) melarikan diri ke hutan, dan tidak bisa ditangkap oleh para pemimpinnya untuk ditukar dengan emas. (Riedel, 1869:68).

Pada 25 Maret 1678, telah disepakati perjanjian antara Robertus Padtbrugge (Gubernur Maluku) dengan Bya (*olongia* Gorontalo). Perjanjian memuat 24 pasal di antaranya (Pasal 15) pedagang VOC dibebaskan melakukan perdagangan budak (Juwono dan Hutagalung, 2005:76-80). Pada 1679, VOC memperbarui perjanjian di antaranya *olongia* Gorontalo diwajibkan menyerahkan 150 budak setiap tahunnya (Hasanuddin dan Amin, 2012:68). Selain budak dari Gorontalo terdapat juga sejumlah besar budak berasal dari Tomini dibawa ke Gorontalo (Henley, 2005:208). Perdagangan emas dan budak telah memberi keuntungan besar bagi VOC di Gorontalo.

Selanjutnya muncul persaingan perdagangan dengan Inggris, menyebabkan kolonial Belanda mengatur pelayaran niaga dan menjalankan sistem monopoli perdagangan. Meskipun sistem perdagangan belum dapat berjalan secara bebas, tetapi telah nampak

keramaian dalam perdagangan hasil ekspor yang dikuasai Inggris melalui Singapura. Musshenbroek (1880) dalam laporan perjalanannya menyatakan bahwa sejumlah kapal dan perahu secara rutin mengunjungi Gorontalo untuk mengambil muatan di luar waktu berlayar ke New Guinea. Kapal-kapal Inggris juga tampak sedang mencari muatan di Gorontalo, dan ketika berangkat kapal-kapal milik Inggris penuh dengan muatan yang berlimpah. Begitupula kapal perang dan sejumlah kapal jelajah milik Belanda sering menyinggahi Gorontalo.

Kemudian Pemerintah Belanda mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal No. 32 tanggal 27 April 1847 tentang peraturan pelaksanaan pendataan kapal dan perahu yang berlabuh dan bertolak di Pelabuhan Gorontalo, batas wilayah pelabuhan, kegiatan ekspor-impor, dan pelayaran niaga (Poelinggomang, 2002:79). Untuk mempermudah pengurusan surat-surat izin berlayar, maka didirikan Kantor Pelabuhan dan Cukai Barang di Gorontalo (Kampung Pabean di Talumolo, Kec. Kota Selatan sekarang). Kebijakan diambil Pemerintah Belanda bertujuan agar lebih memudahkan dan memusatkan kegiatan perniagaan pribumi yang berada di bawah pengawasannya. Selain itu dapat mencegah terjalinnya hubungan niaga dan politik Gorontalo dengan bangsa Eropa lainnya, khususnya Inggris.

Pemerintah Belanda lebih banyak mencurahkan perhatiannya pada pengaturan perdagangan emas dan komoditas hasil bumi dan hutan yang laku di pasaran. Untuk itu, Pemerintah Belanda menekan *olongia* Gorontalo untuk mengakui perjanjian yang diajukannya. Isi perjanjian pada umumnya jelas memuat kepentingan-kepentingan kolonial Belanda dengan cara memperluas kepentingan ekonominya untuk monopoli komoditas perdagangan.

Mengenai perjanjian Pemerintah Belanda dengan *olongia* Gorontalo, Muhijuddin Muhammad Jair Iskandar Monoarfa dilaksanakan pada 31 Desember 1819 yang intinya mengenai penyerahan produksi

tambang-tambang emas dan produksi kopi (Bundel Ternate No. 131). Pada 9 Januari 1828, Pemerintah Belanda kembali mengajukan perjanjian dengan Raja Mohammad Iskandar Pui Monoarfa memuat antara lain *olongia* dan para bangsawan Gorontalo dilarang melakukan kerjasama dengan para pedagang dari Eropa. *Olongia* dan bangsawan Gorontalo dapat melakukan kerjasama dengan para pedagang Eropa atas sepengetahuan Pemerintah Belanda (Pasal 2). Pemerintah Belanda mewajibkan *olongia* dan penduduk Gorontalo menyerahkan 700 *real* emas, sedangkan penghasilan lainnya bebas untuk diperdagangkan (Pasal 10). Keuntungan produksi kopi diserahkan $\frac{1}{4}$ bagian untuk Pemerintah Belanda. Setiap tahunnya harga kopi ditentukan oleh Pemerintah Belanda, tahun 1828 harga kopi dinilai sebesar *f.* 16/pikul (Kartodirdjo, dkk, 1973:374-377).

Setelah dikeluarkannya kebijakan Pemerintah Belanda mengatur penduduk untuk menanam komoditas yang laku di pasaran Eropa. Hal ini menghasilkan berbagai jenis komoditas perdagangan di Gorontalo. Komoditas perdagangan antara lain emas (*aurum*), kopi (*coffea*), kelapa (*cocos nucifera*), kopra, indigo (nila), kapas, sagu (*Maranatha arundinacea*), damar dan rotan. Komoditas lainnya seperti coklat (*theobroma cacao*), tebu (*saccharum officinarum*), tembakau (*zolanum verbascifolium*), gula aren, getah copal, getah kulit kayu (mangkudu) untuk pembuatan pernis dan cat, rotan (*calamus*), damar (*agathis alba*), serta kayu cendana berkualitas tinggi untuk bahan pembuatan perabot semuanya di ekspor. Hasil-hasil utama daerah Gorontalo adalah emas, coklat, karet, teripang, lilin, kuda, kain Gorontalo, beras, dan sebagainya. Dari semua komoditas ini, beberapa di antaranya di ekspor, sedangkan barang impor seperti kain menduduki peringkat utama (Riedel, 1869:94).

Selain komoditas hasil bumi terdapat juga perdagangan senjata berupa tombak, kanon, keris, peluru, dan kelewang yang diusahakan penduduk pada tahun 1827. Dalam 1831-1833 terdapat pengiriman senjata ke Manado, Bangka,

Moutong, Donggala, dan Boalemo. Dalam 1839-1840 kembali diusahakan pengiriman senjata ke Togian, Kwandang, Donggala, Banggai, dan Todjo (ANRI, 1976).

Volume perdagangan Gorontalo secara keseluruhan pada 1856 untuk impor barang sebesar *f.* 9.862, sedangkan ekspor dihasilkan *f.* 25.004. Pada 1886 terjadi peningkatan baik ekspor maupun impor, untuk hasil ekspor dicapai sebesar *f.* 1.359.667 dan impor sebesar *f.* 1.382.312 (Hoevel, 1891:19). Melalui komoditas hasil pertanian, tahun 1872 ekspor coklat sebanyak 2.117 *pikul* dengan harga penjualan sebesar *f.* 105.850, untuk kopi dicapai 630 *pikul* dengan penghasilan sebesar *f.* 18.900, sedangkan impor beras sebanyak 120 *pikul* dengan harga *f.* 740. Usaha ekspor komoditas hasil hutan jenis damar sebanyak 13.765 *pikul* dengan harga *f.* 68.825 dan rotan dihasilkan 5.900 *pikul* harga *f.* 32.450. Pada 1886 ekspor komoditas coklat 1.185 *pikul* dengan harga sebesar *f.* 47.400, kopi 203 *pikul* dengan harga *f.* 3.460. Untuk import beras mencapai 20.804 *pikul* dengan harga sebesar *f.* 104.021 (Haga, 1931:50-51). Pada 1889 eksport kopra terjadi lonjakan sebesar 11.853 *pikul* (Hoevel, 1891:14)

Jaringan lalu lintas perdagangan, kriteria dasar dipenuhi Pelabuhan Gorontalo adalah adanya hubungan antara pasar dunia dengan pasar domestik. Selain itu, hubungan Gorontalo dengan daerah sekitarnya (*city periphery*) di kawasan Teluk Tomini, Limboto, Suwawa, Bone, Bolango, Buol, dan ToliToli. Dalam konteks keluar-masuknya barang di daerah-daerah tersebut telah membentuk jalur-jalur transportasi dan terciptanya pusat-pusat pengumpulan barang dagangan. Faktor terciptanya hubungan interaksi antarpelabuhan telah mendorong pertumbuhan dan perkembangan Gorontalo.



Pelabuhan Gorontalo, 1880 (KLV0011154)

Laporan Asisten Residen Gorontalo mencatat aktifitas perdagangan di pelabuhan Gorontalo. Pada 1822, kapal *kora-kora* mengangkut arak, garam, minyak lampu, dan kayu bakar dari Ternate. Tahun 1829, terdapat kapal *schoener* (sekunar atau kapal layar tipe Eropa) dan kapal *galai* (*gali* bahasa Portugis: *galé* adalah sejenis kapal yang menggunakan dayung sebagai alat penggerak utama) mengangkut beras dari Maluku. Tahun 1831. D. Ibengst dengan *schoener* “Carolina Jacoba” mengangkut cuka, kayu bakar, kopi, minyak lampu, dan beras dari Manado. Saudagar Oemar dengan perahu *padewakang* mengangkut ikan asin, garam, mori, batik, dan lain-lain. Selanjutnya G. Semet dengan *galai* mengangkut arak; dan T. Deighton dengan *schoener* “Sirius” mengangkut candu dari Ternate. Tahun 1832 S. Loedouk dengan *schoener* “Augusta” mengangkut arak dari Manado. I.F. Rauch dengan perahu *padewakang* mengangkut cuka, kayu bakar, kopi, dan beras dari Manado; sedangkan N.L. Pilenkahu dengan *schoener* “Maria Antonetta” mengangkut besi dan candu dari Manado, serta kembalinya mengangkut emas dan chitzen (ANRI, 1976).

Tahun 1833 N.L. Pilenkahu dengan *schoener* “Maria Antonetta” mengangkut barang dagangan seperti arak, beras, cuka, kayu bakar, kopi, dan garam dari Manado serta kembalinya mengangkut emas dan cat. Sedangkan I.N. Weijdemul dengan *schoener* “Pijdong” mengangkut arak, cuka dan beras dari Manado. Begitu pula tahun 1834 A. Cornelis dengan *schoener* “Maria Anthonetta” mengangkut garam, kopi, dan candu dari Manado. Untuk Ahala dengan kapal

kora-kora mengangkut besi dan lain-lain. Begitu pula D. Ibengst dengan *schoener* “Carolina Jacoba” mengangkut arak dan beras dari Manado. Pada 1839 oleh Kamoos dengan kapal *kora-kora* mengangkut beras dari Manado (ANRI, 1976).

Pelabuhan Gorontalo mengalami peningkatan setelah ramai keluar masuk kapal-kapal membawa dan mengangkut komoditas perdagangan. Pemerintah Belanda memandang perlu untuk mengambil-alih Pelabuhan Gorontalo, karena dianggap menguntungkan melalui pemasukan bea dan cukai. Pada 16 Januari 1831, Pemerintah Belanda menekan *Olongia* Lihawa Monoarfa untuk menyepakati perjanjian di antaranya semua bea dan cukai ekspor impor, uang berlabuh dan bongkar muat barang, upeti dan uang pengakuan kepada raja dari syahbandar semuanya di bawah kekuasaan Pemerintah Belanda (Juwono dan Hutagalung, 2005:258).

Setelah 1870, Gorontalo mengalami peningkatan perdagangan setelah munculnya produk rotan, damar, dan kopra sebagai produk ekspor yang menguntungkan. Pada 1873, Gorontalo dimasukkan sebagai pelabuhan panggilan untuk layanan kapal uap reguler dari *Royal Dutch Packet-Boat Company* dan KPM. Salah satu alasan peningkatan Pelabuhan Gorontalo adalah perdagangan rotan dan damar di Teluk Tomini selama 1870-an. Pemerintah Belanda kemudian mengeluarkan kebijakan untuk pembatasan bea cukai pada 1879, memungkinkan untuk mengalahkan Togian dan Parigi sebagai pusat komersial utama untuk seluruh Teluk Tomini. Komoditas perdagangan rotan, damar, dan kopra dari Teluk Tomini di angkut ke Pelabuhan Gorontalo. Pada 1890, Gorontalo menjadi pelabuhan perdagangan yang paling penting di kawasan timur Indonesia setelah Makassar (Koloniaal Verslag, 1874:101; Henley, 2005:457).

Bajak Laut

Dinamika kegiatan pelayaran niaga menjadi kompleks sejak munculnya para perompak atau bajak laut dari Bugis, Makassar,

Mandar, Mindanao, dan Tobelo. Mereka melakukan aktifitasnya di Perairan Gorontalo dan di kawasan Teluk Tomini. Pada 27 September 1677 dalam kunjungan Gubernur Maluku, Robertus Padtbrugge di Gorontalo, masalah perompakan menjadi pembahasan penting dalam pertemuan dengan *olongia* Gorontalo. Padtbrugge menyampaikan bahwa keamanan di Teluk Tomini dan pantai utara Sulawesi sangat rawan bagi pelayaran niaga. Hal ini menunjukkan banyaknya bajak laut berkeliaran di Teluk Tomini dan sulit ditaklukan oleh raja-raja di kawasan Teluk Tomini. Untuk mengamankan pelayarannya di Gorontalo, maka VOC mengontrol langsung kawasan Gorontalo agar mencegah timbulnya kerugian lebih besar terjadi pada perdagangannya. Selanjutnya VOC menekan *olongia* Gorontalo melalui perjanjian antara lain dalam Pasal 8 bahwa *olongia* Gorontalo wajib menjaga keamanan di wilayah perairannya dari gangguan bajak laut dan menyerahkan para bajak laut yang ditangkap kepada VOC (Juwono dan Hutagalung, 2005:74-75).

Para bajak laut Bugis dan Makassar lebih memiliki strategi serta cara kerja yang lebih baik. Sepanjang wilayah operasinya, mereka mendirikan pangkalan-pangkalan yang letaknya strategis di antara pelabuhan besar atau dekat dari transit kapal dagang. Pangkalan mereka antara lain di Kalangkangan untuk mengawasi Pelabuhan Tolitoli, dan Kwandang. Pangkalan Kalangkangan berfungsi untuk mengawasi dan mencegat kapal-kapal yang memuat barang dagangan dari Gorontalo ke Manado. Setiap pangkalan mempunyai seorang pemimpin, dan mereka membentuk jaringan dan saling membantu ketika menghadapi musuhnya (Juwono dan Hutagalung, 2005:108-109).

Hubungan dagang antara bangsawan Gorontalo dengan pedagang Bugis dan Mandar tetap terjalin. Pada 1750-an, pedagang Mandar dipimpin Daeng Mapata memperluas kegiatan operasinya di daerah-daerah pesisir Gorontalo sebagai daerah produksi emas, hasil bumi,

dan hutan. Daeng Mapata memiliki hubungan dagang dengan *Olongia* Botutihe dan bangsawan Gorontalo. Daeng Mapata membeli hasil-hasil hutan dari Gorontalo dan paling utama adalah kayu, lilin, madu, damar, getah, dan rotan (Juwono dan Hutagalung, 2005:166). Selain itu, pedagang Bugis, Mandar, dan Makassar membeli barang dagangan yang dilarang diperdagangkan oleh VOC, seperti senjata, amunisi, candu, dan budak merupakan komoditas utama yang menghasilkan keuntungan besar.

Akibat hubungan kerjasama antara *olongia* dan bangsawan Gorontalo dengan para bajak laut Bugis dan Mandar menyebabkan VOC mengalami kerugian besar. VOC menuduh *olongia* melanggar perjanjian-perjanjian yang telah disepakati dengan mengusir para bajak laut dari daerahnya. Sebaliknya, benteng "Nassau" VOC yang letaknya di Muara Sungai Gorontalo dengan sejumlah pasukan untuk mengamankan kepentingan politik dan ekonominya ternyata tidak banyak membantu mencegah aktivitas para bajak laut. Begitu pula kurangnya jumlah kapal VOC di Perairan Gorontalo menyebabkan tidak efektifnya pengawasan dan kontrol terhadap para bajak laut di kawasan Gorontalo.

Pada awal abad ke-18, terjadi peningkatan jumlah perompakan kapal-kapal dagang VOC yang dilakukan bajak laut dari Bugis, Makassar, dan Mindanao. Munculnya pelaut Mandar sebagai bajak laut telah menambah semakin meningkatnya perompakan di kawasan Gorontalo. Untuk mempermudah pengawasan di Teluk Tomini, bajak laut Mandar mendirikan pangkalannya di Gorontalo. Laporan semakin banyaknya perompakan dan munculnya bajak laut Mandar menyebabkan Gubernur Maluku, Pieter Rooselaar di Ternate mengambil tindakan untuk mengusirnya. Pada 1702, Rooselaar mengirim utusannya ke *olongia* Gorontalo agar melarang para pelaut asing menetap di Gorontalo. Namun permintaan Rooselaar mendapat penolakan dari *Olongia* Walangadi. Faktor ini menyebabkan Rooselaar memerintahkan untuk menyerang basis pangkalan bajak laut Bugis, Mandar, dan bajak laut lainnya di Gorontalo. Kemudian dikirim

armada VOC dibantu penduduk Tambora ke Gorontalo, VOC berhasil mengalahkan dan mengusir para bajak laut di Gorontalo. Pada 25 Februari 1703, setelah para bajak laut tidak kembali lagi ke Gorontalo, kemudian Rooselaar memerintahkan untuk menarik kembali armadanya ke Ternate (Juwono dan Hutagalung, 2005:110-111).

Meningkatnya perompakan di kawasan Teluk Tomini, mengakibatkan VOC mengalami kerugian besar. Gubernur Maluku memerintahkan *olongia* Gorontalo yang mempunyai pengaruh di kawasan Teluk Tomini agar menyelesaikan keamanan di daerah itu. Walaupun *olongia* Gorontalo menyetujuinya, tetapi sebagian besar bangsawan menolaknya. Para bangsawan menyadari tekanan politik VOC melalui perjanjian atau kontrak yang telah disepakati sangat merugikan posisi Gorontalo. Mereka lebih suka berhubungan dengan pedagang Bugis dan Mandar yang lebih banyak memberi keuntungan daripada menjalin hubungan dagang dengan VOC. Tidak mengherankan beberapa bangsawan memberikan kemudahan bagi aktifitas para bajak laut dalam melakukan penyelundupan dan memberi perlindungan, sehingga bajak laut sulit ditangkap oleh VOC.

Pada 1820, akibat tekanan patroli kapal perang Belanda maka bajak laut Tobelo melakukan persekutuan dengan bajak laut Mindanao, mereka mempunyai persembunyian dan logistik (Velthoen, 2010:204). Perahu bajak laut Tobelo memuat sampai 10 orang dan terdapat 4 atau 5 perahu dalam melakukan kegiatan ekspedisinya. Untuk ekspedisi yang lebih penting atau besar, beberapa perahu kecil diikat bersama untuk membentuk pasukan yang lebih besar di bawah perintah seorang pimpinannya. Pada 1870, terdapat 48 perahu bajak laut Tobelo beroperasi di Teluk Tomini. Kemudian dipisah menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil dan menyebar ke perairan timur Sulawesi (Velthoen, 2010:214).

Perompakan di Teluk Tomini dan pantai utara Sulawesi sering dianggap sebagai bentuk menentang penindasan oleh pihak yang lemah

terhadap mereka yang mendominasi. Para bajak laut di Teluk Tomini yang terkenal selama abad ke-19 adalah Tombolotutu seorang bangsawan dan kemudian diangkat menjadi raja Muton dan dianggap oleh penduduk setempat sebagai tokoh yang bangkit menentang dominasi ekonomi Pemerintah Belanda (Juwono dan Hutagalung, 2005:21).

Laporan umum Asisten Residen Gorontalo dalam catatannya tahun 1824, 1832, 1833, dan 1834 terjadi jumlah perompakan yang cukup besar. Kemudian Asisten Residen Gorontalo menyurat kepada Gubernur Jenderal Hindia-Belanda tentang aktifitas para bajak laut, dan meminta bantuan Gubernur Jenderal untuk secepatnya menumpas para bajak laut yang telah mengganggu pelayaran dan perdagangan di wilayahnya (ANRI, 1976). Laporan Asisten Residen Gorontalo ditanggapi serius Gubernur Jenderal Hindia-Belanda di Batavia dengan menempatkan sebuah kapal perang di Perairan Gorontalo (Rosemberg, 1865:15).

Pertengahan abad ke-19, pelaut Mandar telah menempati kedudukan penting dalam kegiatan penyelundupan dan perdagangan gelap. Mereka melakukan hubungan dagang dengan orang Kaili, Bugis, dan Gorontalo. Bajak laut Mandar membawa kain, candu, dan beras ke Gorontalo. Setelah memasukkan barang dagangannya, kemudian mengangkut damar, lilin, teripang, sagu, dan kulit kerang (Juwono dan Hutagalung, 2005:322-323).

Terbentuknya Perkampungan Pedagang dan Pendatang

Jalur pelayaran niaga merupakan jalan dan kemudahan terpenting untuk menyelenggarakan transportasi dan komunikasi yang menarik berbagai etnis berdatangan dan mendirikan perkampungan di Gorontalo. Merupakan hal yang bersifat taktis dan strategis bagi suatu kerajaan untuk kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan.

Penduduk Gorontalo yang sifatnya heterogen terdiri atas berbagai suku bangsa pada dasarnya terjadi karena sikap orang Gorontalo

sebagai penduduk asli, terbuka menerima kedatangan berbagai pedagang dan pendatang dari luar daerah mereka. Orang Gorontalo menganut paham keterbukaan sehingga setiap pendatang dapat diterima dengan baik. Dengan sikap ini, sangat terbuka bagi suku bangsa dan bangsa-bangsa asing masuk dan bermukim di daerah ini. Di lain pihak daerah Gorontalo yang wilayahnya luas dengan jumlah penduduk yang relatif kecil mendorong para pendatang untuk membuka pemukiman dan dikembangkan menjadi perkampungan yang namanya sesuai dengan daerah asalnya.

Para imigran dan pedagang dari Ternate, Bugis, Makassar, Mandar, Cina, Arab, Eropa (Belanda) dan Minahasa memberikan nuansa tersendiri bagi perkembangan Gorontalo. Dengan demikian terjadinya hubungan berbagai suku bangsa dapat membawa aspek sosial yang penting. Hubungan antarsuku bangsa memberi kemungkinan terbukanya komunikasi dan pertukaran berbagai pengalaman dari daerahnya.

Berbagai kategori penduduk yang mendiami daerah Gorontalo, pertama sebagai penduduk asli Gorontalo yang hidup mengelompok dalam unit-unit kecil (*linula*) dan merupakan satu kesatuan sosial ekonomi (Haga, 1931:4). Menurut Lipoeto (1943) bahwa awalnya pemukiman mereka menyebar di sekitar Gunung Buliohuto dan Tilongkabila, sekitar Danau Limboto. Setelah Ilahudu diangkat sebagai *olongia* Gorontalo mencoba untuk mengumpulkan suku-suku Gorontalo di kawasan tersebut. Usaha ini mengalami banyak kesulitan dan hanya sebagian penduduk termasuk kerabat mereka, mau menetap di pusat kerajaan bersama para tetua dan kepala adat mereka (Riedel, 1869:62).

Penataan penduduk pribumi kembali diatur sejak VOC mulai berkuasa di Gorontalo. Para *olongia* Gorontalo, Limboto, Bone, dan Atingola diperintahkan untuk membuka pemukiman di muara Sungai Golontalo. Orang-orang Golontalo membuka pemukiman yang dikenal dengan Kampung Heledulaa. Orang Limboto menempati daerah dikenal dengan

Kampung Siendeng, sebelumnya dihuni oleh orang-orang dari Siendeng, Teluk Tomini. Orang Atinggola membuka pemukiman baru sekarang (Kecamatan Atinggola). Orang-orang Bone membuka pemukiman sepanjang aliran Sungai Bone di dekat Kampung Ipilo (Riedel, 1869:111).

Kolonisasi orang-orang Belanda dimulai dari 1705 setelah Gubernur Maluku, Padtbrugge menuntut Olongia Lahay dan Lepe agar menyediakan suatu wilayah bagi kedudukan dan kepentingan VOC. Kemudian tuntutan Padtbrugge mendapat persetujuan dari *olongia* Gorontalo dengan memberi sebuah kawasan di bagian selatan. Setelah itu, VOC mengutus perwakilannya di Gorontalo. Pada 1746, pembangunan benteng VOC sebagai kantor dagang (*factory*), gudang penyimpanan barang (*pakhuis*), dan sebuah rumah bagi residen VOC dibangun di Gorontalo (Riedel, 1869:110-111).

Pada masa Pemerintah Belanda, Kampung Tenda dikembangkan menjadi kompleks perkantoran Pemerintah Belanda yang terletak di tengah kota sebagai pusat pemerintahan administratif Assisten Residentie meliputi Kantor *Asisten Residen, Controleur, Hooft Agent Stad Politie, Nederlandsch-Indische Handels-Bank, Copra Fonds*, Telepon, Pos dan Telegrap, Keuangan dan Kesehatan. Dalam kawasan tersebut pejabat dan pegawai rendahan maupun anggota militernya mendirikan pemukiman khusus dengan pos keamanan terletak di tepi jalan besar kota dan terpisah dari pemukiman pribumi, kemudian disebut Kampung Belanda.

Selain itu, kedatangan orang Bugis dan Makassar tidak terlepas setelah disepakatinya Perjanjian Bungaya 1667, hal ini menyebabkan terjadinya imigran dalam skala besar, baik di luar maupun di wilayah Nusantara yang pernah di bawah pengaruhnya termasuk Gorontalo (Farid, 1983:56-57). Berawal dari para pedagang Bone membentuk perkampungan serta mengembangkannya dalam kerajaan kecil – sesuai nama daerah asalnya, mereka mendiami sekitar Sungai Bone dan Pantai Bone. Menurut Henley bahwa awal abad ke-19, pelayaran dan perdagangan Gorontalo umumnya dikuasai oleh

orang-orang Bugis (Henley, 2005:87). Laporan Rosenberg (1865:100) memberikan gambaran bahwa terdapat beberapa kampung yang dihuni orang-orang Bone.

Perkampungan Bugis, Luwu, Mandar, dan Donggala sebelum masuknya kekuasaan Belanda telah lama menetap di Gorontalo. Kemudian mereka menjadi unsur penting bagi penduduk Gorontalo dengan mata pencaharian tidak tetap. Kehidupan mereka sibuk dengan sabung ayam, perjudian, dan kebiasaan buruk lainnya. Selain itu, mereka merongrong kekuasaan baik para pejabat Belanda maupun para kepala pribumi dengan menampung semua pelarian dan pemberontak sebagai tempat perlindungannya. Mereka juga menghasut penduduk untuk melakukan perlawanan atau memotivasi dengan nasehat dan tindakan. Kepemimpinan komunitas Bugis dijabat oleh seorang kapitan, namun kurang berpengaruh lagi karena usianya berumur 80 tahun. Umurnya yang sudah tua tidak cocok untuk memimpin penduduk yang berada di bawah perintahnya dan tidak mampu mengontrol situasi secara serius. Kurangnya perhatian pemimpin mereka mengakibatkan kondisi sosial di perkampungan Bugis sangat memprihatinkan (Riedel, 1869:67-69).

Kebiasaan orang Bugis, seperti sabung ayam dan perjudian dilakukan siang dan malam bahkan semakin ramai dan berkembang sampai ke hulu, hal ini membawa dampak bagi penduduk Gorontalo. Kebiasaan orang-orang Bugis mendapat kecaman dari *olongia* Gorontalo. Pada 31 Maret 1791, Raja Muhammad Hasanuddin Iskandar Panglima Syah menyurat kepada Gubernur Jenderal Willem Arnold Alting dengan memohon agar menyelesaikan kebiasaan orang-orang Bugis yang telah mengganggu ketentraman penduduk Gorontalo (Mu'jizah, 2009:144).

Dalam perkembangan selanjutnya, Kampung Bugis mengalami perluasan setelah Olongia Monoarfa melalui kapitalau meminta bantuan orang-orang Bugis untuk mengusir para perompak Mindanao dan Tobelo yang berkeliaran di perairan Gorontalo. Akhirnya mereka berhasil mengusir para perompak tersebut. Setelah

itu pola pemukiman mereka berkembang di muara Sungai Bone (Kelurahan Bugis) sampai Kampung Tamalate (Kelurahan Tamalate). Pada 1824, populasi penduduk di Kampung Bugis sebanyak 691 jiwa, mengalami peningkatan 1843 sebanyak 1.217 jiwa, kemudian mengalami penurunan 1852 menjadi 750 jiwa, dan kembali meningkat 1865 sebanyak 1.823 jiwa (Henley, 2005:196).

Kemajuan niaga bukan hanya menarik kaum pedagang untuk membeli dan menjual dagangannya, tetapi juga membuka pemukiman baru. Begitu pula kolonisasi Cina dan Arab membangun pemukiman di sekitar muara Sungai Bolango dan dikembangkan sebagai pusat perdagangan. Kedatangan orang Cina tidak diketahui secara pasti, beberapa sumber mengatakan bahwa mereka masuk ke Gorontalo melalui Manado. Untuk dapat melacak bukti-bukti keberadaan orang Cina dapat diketahui pada nisan kubur tertua (di Kampung Siendeng) berangka 1863. Demikian pula pembangunan Kelenteng “Tan Hou Kiong” tertulis prasasti dibangun pada 1883. Kelompok Etnik Cina terdiri dari berbagai sub kelompok, di antaranya terdiri beberapa suku yaitu Hokkian, Khe, Kanton, dan Hainan.

Penetapan lokasi pemukiman bagi orang-orang Cina pertama-tama mempertimbangkan segi-segi praktis, sama seperti di negeri Cina dimana sungai berperan penting sebagai sarana perdagangan dan transportasi. Di sekitar Sungai Bolango mereka mendirikan perkampungan yang khas Cina dan sekaligus menjadi satuan sosio-ekonomi sebagai satu komunitas yang produktif. Kawasan pemukiman (pecinan) merupakan pusat perdagangan menempati lokasi sekitar muara Sungai Bolango (Jl. Suprpto. Kelurahan Biawao). Di kawasan itu mereka mendirikan Kelenteng “Tan Hou Kiong” yang diprakarsai oleh Lie Bun Yat, Kho Lin Tjie, Yo Ho Lian, dan Lie Bun Tjae (Jl. S. Parman) sebagai pusat pemukimannya. Kelenteng dibangun selain sebagai tempat beribadah bagi umat beragama Budha, Tao, dan Kong Hu Cu juga sebagai sarana pemersatu bagi etnis Cina. Untuk itu kompleks

pemukiman etnik Cina sangat strategis yang sesuai dengan inti pola kehidupannya sebagai pedagang yakni berdekatan dengan kelenteng, pasar, dan pelabuhan.

Walaupun orang-orang Cina telah lama menetap di Gorontalo terutama sejak ditemukannya emas, namun pada 1870-an orang-orang Cina dalam jumlah besar menetap di Gorontalo. Faktor ini disebabkan kebijakan Pemerintah Belanda mendatangkan orang-orang Cina agar menjadi saingan dominasi ekonomi pedagang Bugis yang sulit dikendalikan oleh Pemerintah Belanda. Mereka diberi lokasi sendiri dan dikembangkan menjadi perkampungan Cina (pecinan). Kedatangan para pedagang Cina menjadikan perdagangan semakin dinamis dan ramai. Umumnya imigran Cina dari Manado memegang usaha perdagangan kecil (Riedel, 1869:67).

Kolonisasi Arab membangun pemukiman di sekitar muara Sungai Bolango sebagai daerah perdagangan. Para pedagang Arab sebagian besar berasal dari Surabaya, di samping berdagang mereka juga berdakwah dalam menyiarkan Islam. Tidak mengherankan mereka membangun mesjid sebagai pusat kehidupannya dan kawasan tersebut dikembangkan menjadi pusat aktifitas perdagangannya (Jl. Panjaitan). Mereka membangun pemukiman (*pakojang*) menempati wilayah pusat kota Gorontalo (Jl. M.T. Haryono dan Jl. Iman Bonjol, Kelurahan Biawao), pemilihan lokasi pemukiman tersebut disesuaikan dengan letaknya yang tidak jauh dari mesjid dan tempat perniagaannya. Penduduk umumnya memberi gelar “Said” dan dianggap sebagai orang suci serta sangat dihormati oleh penduduk, sedangkan gelar “Syech” yang lebih disegani sangat kurang jumlahnya (Tacco, 1935:31-32). Setelah peristiwa pemberontakan Syarif Mansur –tokoh Arab dari Buol– menyerang kekuasaan Pemerintah Belanda di Manado pada 26 Agustus 1875 (Lapian, 2011:259), hal ini membawa pengaruh bagi komunitas Arab. Pemerintah Belanda mulai mengawasi dan membatasi perdagangan bagi orang-orang Arab di Gorontalo.

Sejumlah kecil orang Eropa dan yang dipersamakan terdiri atas pejabat, pedagang, dan industrialis. Selain orang Bugis, Cina, dan Arab terdapat juga penduduk yang terdiri atas orang pribumi berasal dari Jawa, Ternate, Minahasa, dan Tidore yang sejak dahulu telah menikmati hak istimewa di atas penduduk biasa dengan dibebaskan dari pajak dan kerja wajib. Mereka bekerja sebagai pedagang kecil, perikanan, dan perkapalan, berada di bawah pengawasan langsung seorang *controleur*. Penduduk pribumi terdiri dari kaum bangsawan, warga pribumi dan budak atau anak semang yang dibebaskan. Bagi orang Arab dan Melayu yang datang ke Gorontalo di bawah kekuasaan Ternate bercampur dengan kaum bangsawan tinggi (Riedel, 1869:64-66).

Selain aparat pemerintah sipil, kebanyakan orang Eropa yang menetap adalah orang Belanda dan terdapat juga sejumlah keluarga bangsawan Gorontalo. Keluarga bangsawan termasuk mereka yang dipersamakan klasnya dengan orang Eropa, kemudian pemukiman mereka terbagi atas dua kampung yang hidup rukun, yakni kampung Eropa dan kampung Indo-Eropa. Berkat kebijakan dari kepala pemerintahan, maka jarang terjadi persaingan dan konflik di antara mereka dan diawasi secara ketat (Bataviaasch Nieuwsblad, 1 Desember 1928, lembar ke-17).

Mengenai penduduk Gorontalo, di beberapa kampung terdapat kepadatan penduduk lebih tinggi seperti di Kota, Kampung Bugis, Ipilo, Biawau, Liato, Talumolo, Limba, dan Heludulaa. Selain Kota, jumlah penduduk perkampungan tersebut secara keseluruhan 4.600 jiwa. Angka komposisi penduduk meliputi Eropa berjumlah 41 jiwa, Bugis, Cina dan Jawa berjumlah 2.400 jiwa (Rosemberg, 1865:15). Pada 1864, jumlah penduduk seluruh distrik sebanyak 62.588 jiwa, 1865 *meningkat menjadi* 63.090 jiwa, dan tahun 1866 mengalami peningkatan sebanyak 66.146 jiwa (Riedel, 1869:64). Kecenderungan meningkatnya jumlah penduduk dan kepadatan penduduk pada kampung-kampung tersebut disebabkan letaknya berdekatan dengan pusat administratif *asissten residentie* dan pusat perdagangan.

Dampak kegiatan perdagangan yang kondusif, menciptakan perluasan Kota Gorontalo semakin dinamis dan menimbulkan urbanisasi dari berbagai daerah. Di kota terdapat pekerjaan yang tersedia serta upah yang layak menjadi pendorong utama perpindahan penduduk tersebut, juga perluasan administrasi pemerintah yang membutuhkan sejumlah tenaga. Kecenderungan terjadi meningkatnya jumlah penduduk yang heterogen, disebabkan oleh masuknya berbagai komunitas penduduk telah membawa pengaruh sosial bagi masyarakat Gorontalo.

Sehubungan semakin berkembangnya perekonomian dan bertambahnya laju pertumbuhan penduduk Gorontalo, maka Pemerintah Belanda memandang perlu adanya pembagian administratif baru dalam mengatur kehidupan perkotaan. Kebijakan awal dibuat Pemerintah Belanda adalah menetapkan batas-batas Kota Gorontalo secara resmi. Batas-batas ini kemudian dijadikan sebagai wilayah ibukota *Afdeeling* Gorontalo. Pada 1894, Kota Gorontalo diresmikan sebagai ibukota *Afdeeling* Gorontalo.

PENUTUP

Ramainya jalur pelayaran kawasan Teluk Tomini dan perairan Gorontalo telah mendorong munculnya para bajak laut yang juga melakukan perdagangan. Mereka melakukan kerjasama dengan para bangsawan dalam bidang perdagangan yang saling menguntungkan dan mendapat perlindungan dari ancaman kolonial Belanda. Selain itu, kemajuan pelayaran niaga telah menarik kaum pendatang dan pedagang sebagai suatu komunitas, kemudian mendirikan dan mengembangkan perkampungan sesuai dengan nama daerah asalnya, seperti perkampungan Bugis, Donggala, Tamalate, Paguyaman, Minahasa, Cina, dan Arab. Munculnya perkampungan-perkampungan tersebut telah memberi arti pada perkembangan keragaman sosial Gorontalo, dan secara langsung terciptanya perluasan kota Gorontalo. Begitu pula keberadaan perkampungan-perkampungan pedagang telah menciptakan

peningkatan kebudayaan bagi penduduk setempat dengan menerima unsur-unsur baru dari luar, sehingga pengenalan antarsuku bangsa memberi kemungkinan terbukanya komunikasi dalam pertukaran pengalaman-pengalaman di daerahnya yang menjurus pada kesadaran tentang kesatuan suku bangsa dari seluruh tanah air.

Pelayaran dan perdagangan dapat mendorong kemajuan suatu daerah dengan struktur sosial dan politiknya mengalami perubahan-perubahan dan mempengaruhi kehidupan masyarakat Gorontalo. Faktor dari luar dengan kehadiran bangsa Belanda dan para pedagang membawa ideologi, sistem dan berbagai unsur lainnya membawa kegoncangan dalam sistem yang lama. Akibatnya muncul berupa reaksi, adaptasi dan penolakan terhadap unsur dari luar menciptakan dinamika kehidupan masyarakat.

Terjadinya hubungan geografis mewujudkan pula hubungan yang lebih erat antara beberapa daerah di Indonesia dan sekedar penurunan dari tekanan kepadatan penduduk, paling tidak sepanjang menyangkut lapangan kerja. Pengenalan antarsuku bangsa, terutama yang dilakukan oleh para pendatang, memberikan kemungkinan terbukanya komunikasi dalam pertukaran pengalaman-pengalaman di daerahnya, yang akan menjurus pada kesadaran tentang kesatuan dari suku bangsa dari seluruh tanah air.

DAFTAR PUSTAKA

ANRI

Bundel Ternate, Nomor 131.

Arsip yang Diterbitkan

ANRI. 1976. *Inventaris Arsip Gorontalo 1810-1865*. Jakarta: ANRI.

Kartodirdjo, Sartono, dkk. 1973. *Ikhtisar Keadaan Politik Hindia-Belanda Tahun 1839-1848*. Penerbitan Sumber-Sumber Sejarah No. 5. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.

Koloniaal Verslag, Tahun 1874.

Artikel/Buku

Farid, Andi Zainal Abidin. 1983. *Persepsi Orang Bugis, Makassar Tentang Hukum, Negara dan Dunia Luar*. Bandung: Alurni.

Gottshalk, Louis. 1986. *Mengerti Sejarah*. Nugroho Notosusanto (terj.). Jakarta: UI Press.

Haga, B. J. 1931. *De Lima-pahalaä (Gorontalo): Volksordering Adatrecht en Bestuurspolitiek*, LXXI. Bandoeng: A.C Nix.

Hasanuddin dan Basri Amin. 2012. *Gorontalo Dalam Dinamika Sejarah Masa Kolonial*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Henley, David. 2005. *Fertility, Food and Fever: Population, Economy and Environment in North and Central Sulawesi, 1600-1930*. Leiden: KITLV.

Hoevel, G. W. W. C Baron van. 1891. "Onder Rechtstreeksch Bestuur Is Gebracht", *De Assistant-Residentie Gorontalo*. Leiden: E.J. Brill.

Juwono, Harto dan Yosephine Hutagalung. 2005. *Limo Lo Pohalaa: Sejarah Kerajaan Gorontalo*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Kartodirdjo, Sartono. 2014. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Kuntowijoyo. 1995. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Benteng.

Lapian, Adrian B. 1987. *Orang Laut-Bajak Laut-Raja Laut: Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX*. *Disertasi*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

-----1997. "Laut, Pasar dan Komunikasi Budaya", *Kongres Nasional Sejarah 1996 Sub Tema Dinamika Sosial Ekonomi III*. Jakarta: Depdikbud, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.

-----2011. *Orang Laut, Bajak Laut, Raja Laut: Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX*. Jakarta: Komunitas

- Bambu.
- Lipoeto, M. H. 1943. *Sedjarah Gorontalo, Doea Lima Pahalaa*. Jilid 1. Gorontalo: Pertjetakan Ra'jat.
- Mahan, Alfred Thayer. 1890. *The influence of sea power upon history 1660-1783*. Cet. 1. London : University Paperbacks.
- Mu'jizah. 2009. *Iluminasi Dalam Surat-Surat Melayu Abad Ke-18 dan Ke-19*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia bekerja sama École française d' Extrême-Orient, Pusat Bahasa-Departemen Pendidikan Nasional, KITLV-Jakarta.
- Musschenbroek, S.C.J.W van. 1880. "Toelichtingen Behoorende Bij de Kaart van de Bocht van Tomini of Gorontalo en Aangrenzende Landen, *Tijdschrift voor Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap (TNAG)*, Jilid IV.
- Perpustakaan Nasional, III D, 1/22. *Laporan Raja Bolango Abdullatif bin Muhammad Saleh Tilahungga Wadilapa*.
- Poelinggomang, Edward L. 2002. *Makassar Abad XIX. Studi tentang Kebijakan Perdagangan Maritim*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Riedel, G.J.F. 1869. "Het landschappen Holontalo, Limoeto, Bone, Boalemo en Katinggola of Andagile: geographische, statistische, historische en ethnographische aantekeningen", dalam *Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde (TBG)*, XIX.
- Rosemberg, C.B.H von. 1865. *Reistogten in de afdeeling Gorontalo, gedaan op last der Nederlandsch Indische regering*. Amsterdam: Muller.
- Tacco, Richard. 1935. *Het volk van Gorontalo (historich traditioneel maatschappelijk cultureel sociaal, karakteristiek en economisch)*. Gorontalo: Yo Un Ann.
- Velthoen, Esther. 2010. "Pirates in the Periphery: Eastern Sulawesi 1820-1905", *Pirates, Ports, And Coats In Asia* (Historical and Contemporary Perspectives). John Kleinen dan Manon Osseweijer (ed.). Series on Maritime Issues and Piraty in Asia. Singapore: IIAS/ISEAS.

Surat Kabar

"Brieven Uit De Groote Oost", *Bataviaasch Nieuwsblad*, tanggal 1 Desember 1928, lembar ke-17.